

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, serta menganalisa keberpihakan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan (*pro-poor growth*). Analisa dilakukan melalui data panel 26 propinsi di Indonesia dengan menggunakan model *fixed effect*. Hasil analisa yang telah dilakukan tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan penting yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Hasil estimasi model pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan menunjukkan bahwa pada periode 1980-2008 dan 1999-2008, pada tingkat propinsi secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi signifikan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Sedangkan untuk periode 1980-1996, pertumbuhan ekonomi tidak signifikan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Artinya, pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada periode tersebut tidak berpengaruh pada naik atau turunnya ketimpangan pendapatan. Terkait dengan berpengaruhnya pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan pada periode 1980-2008 dan 1999-2008, hasil estimasi menunjukkan adanya perbedaan nilai elastisitas ketimpangan pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu bernilai negatif pada periode 1980-2008, sedangkan pada periode 1999-2008 bernilai positif. Hal ini berarti bahwa pada tingkat propinsi secara keseluruhan di periode 1980-2008, pertumbuhan ekonomi yang terjadi mengurangi ketimpangan pendapatan. Sementara itu, pada periode 1999-2008, pertumbuhan ekonomi di tingkat propinsi secara keseluruhan berkorelasi positif dengan ketimpangan pendapatan yang berarti pertumbuhan ekonomi yang terjadi meningkatkan ketimpangan pendapatan. Nilai *fixed effect* yang dihasilkan dari analisa data panel menunjukkan bahwa dengan memperhitungkan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan, kondisi ketimpangan

pendapatan paling besar berada pada propinsi Papua, Yogyakarta, dan Kalimantan Timur untuk periode 1980-2008 serta propinsi Yogyakarta, Papua, dan Nusa Tenggara Timur untuk periode 1999-2008.

Selanjutnya analisa pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dilakukan dengan mengidentifikasi elastisitas bruto dan elastisitas neto kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi. Elastisitas bruto kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi mencerminkan efek langsung dari pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan (efek pertumbuhan ekonomi atau pendapatan). Sementara itu, elastisitas neto kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi yang mencerminkan efek langsung dan efek tidak langsung pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan melalui efek ketimpangan pendapatan.

Hasil analisa menunjukkan bahwa pada tingkat propinsi secara keseluruhan di semua periode analisis, dengan asumsi ketimpangan pendapatan tidak berubah, pertumbuhan ekonomi signifikan berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan (P0, P1, dan P2). Namun demikian, elastisitas bruto kemiskinan (P0, P1, dan P2) terhadap pertumbuhan ekonomi di periode 1999-2008 lebih kecil dibanding periode 1980-1996. Hal ini mengindikasikan bahwa pada tingkat propinsi secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi yang terjadi (dengan asumsi ketimpangan pendapatan konstan) semakin tidak elastis dalam mengurangi kemiskinan.

Terkait dengan efek ketimpangan pendapatan pada kemiskinan, analisa pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan hanya signifikan berpengaruh pada kemiskinan di periode 1980-2008 dan 1999-2008. Namun demikian, pengurangan ketimpangan pendapatan yang terjadi akibat adanya pertumbuhan ekonomi pada periode 1980-2008 justru meningkatkan kemiskinan. Pengurangan ketimpangan yang terjadi dari pertumbuhan ekonomi ini mengindikasikan adanya redistribusi pendapatan dari kelompok kaya ke kelompok miskin, namun sayangnya pengurangan ketimpangan ini justru meningkatkan kemiskinan. Sedangkan analisa periode 1999-2008 menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan hanya signifikan berpengaruh terhadap *poverty gap index* (P1) dan *poverty severity index* (P2).

Pada periode 1999-2008, peningkatan ketimpangan pendapatan yang terjadi akibat adanya pertumbuhan ekonomi justru mengurangi *poverty gap index* (P1) dan *poverty severity index* (P2). Hal ini mengindikasikan bahwa pada periode 1999-2008, perubahan ketimpangan pendapatan yang terjadi dari adanya pertumbuhan ekonomi mampu mengangkat kelompok penduduk miskin mendekati garis kemiskinan, tetapi tidak sampai mengangkat mereka ke atas garis kemiskinan. Sementara itu, selama periode analisa, kondisi kemiskinan (dengan memperhitungkan pengaruh pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan) paling buruk berada di propinsi Papua, Kalimantan Timur, Riau, dan Aceh.

Berdasarkan analisa terhadap *gross impact* pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan tersebut, terdapat beberapa kesimpulan. *Pertama*, pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada periode 1980-2008 (juga selama periode 1980-1996 dan 1999-2008) mampu mengurangi kemiskinan melalui efek pendapatan (ketimpangan pendapatan dianggap konstan). Namun demikian, elastisitas bruto kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi semakin tidak elastis. Artinya, bila ketimpangan pendapatan dianggap konstan, maka pengurangan kemiskinan akibat pertumbuhan ekonomi semakin berkurang. *Kedua*, pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengurangan kemiskinan kurang didorong oleh efek ketimpangan pendapatan. Hasil analisa menunjukkan bahwa periode 1980-1996 efek ketimpangan pendapatan tidak “bekerja” dalam mempengaruhi kemiskinan. Bahkan pada analisa periode 1980-2008 menunjukkan bahwa pengurangan ketimpangan pendapatan dari adanya pertumbuhan ekonomi tidak pro pada kemiskinan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengurangan kemiskinan yang terjadi di Indonesia lebih didorong oleh faktor pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, analisa pengaruh neto pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan menunjukkan bahwa pada tingkat propinsi secara keseluruhan di semua periode analisis, dengan memperhitungkan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan, pertumbuhan ekonomi (pendapatan per kapita) signifikan mengurangi kemiskinan (P0, P1, dan P2). Berdasarkan analisa tersebut pula diketahui bahwa selama periode analisa, kondisi kemiskinan

(dengan memperhitungkan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan) paling buruk berada pada propinsi Papua, Kalimantan, Riau, dan Aceh. Analisa perbandingan antar periode juga menunjukkan bahwa elastisitas neto kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi periode 1999-2008 lebih rendah dibanding periode 1980-1996. Meskipun demikian nilai elastisitas neto kemiskinan pada periode 1999-2008 lebih tinggi dibandingkan dengan elastisitas brutonya. Kondisi ini berbeda dengan dengan periode 1980-1996 yang memiliki elastisitas neto kemiskinan yang cenderung lebih rendah (atau hampir sama) dibandingkan dengan elastisitas brutonya. Demikian juga halnya yang terjadi pada periode 1980-2008. Pada periode tersebut elastisitas neto kemiskinan terhadap kemiskinan juga lebih rendah dibanding elastisitas bruto. Hal ini disebabkan oleh efek ketimpangan pendapatan yang tidak pro pada kemiskinan. Bahkan untuk periode 1980-1996, efek ketimpangan pendapatan tidak 'bekerja' dalam mendorong pengurangan kemiskinan.

Hasil perhitungan PPGI menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi untuk tingkat propinsi secara keseluruhan di periode 1980-2008, 1980-1996, dan 1999-2008 adalah pertumbuhan ekonomi yang pro terhadap kemiskinan (*pro-poor growth*). Hal ini mengindikasikan bahwa porsi pertumbuhan ekonomi banyak dinikmati oleh kelompok penduduk miskin sehingga mengurangi kemiskinan. Namun demikian, nilai elastisitas kemiskinan (baik bruto maupun neto) terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tergolong rendah dan lebih kecil dari negara lain seperti Bangladesh dan Korea. Selain itu, pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan melalui efek ketimpangan pendapatan pun tidak terlalu besar.

6.2 Rekomendasi Kebijakan

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia, salah satu langkah yang dapat ditempuh oleh pemerintah (pusat dan daerah) adalah melalui pertumbuhan ekonomi yang pro pada kemiskinan (*pro-poor growth*). Guna mencapai hal tersebut dan berdasarkan pada hasil penelitian ini, maka implikasi kebijakan yang perlu mendapat perhatian bagi pemerintah adalah sebagai berikut:

- Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi telah pro terhadap kemiskinan. Oleh sebab itu, penting bagi pemerintah untuk mempertahankan hal ini. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi harus tetap diarahkan untuk dapat mengurangi kemiskinan.
- Meskipun pertumbuhan ekonomi tergolong pro pada kemiskinan, namun elastisitas kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi masih tergolong rendah. Hal ini berimplikasi pada masih rendahnya pengurangan kemiskinan dari adanya pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, penting bagi pemerintah untuk memperbesar pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pengurangan kemiskinan.
- Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengaruh pertumbuhan terhadap kemiskinan melalui efek ketimpangan pendapatan masih rendah. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mengarahkan agar pertumbuhan ekonomi yang terjadi berakibat pada semakin meratanya distribusi pendapatan di semua kelompok penduduk (miskin dan tidak miskin) sehingga dapat mendorong pengurangan kemiskinan.

Ketiga hal tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah dengan cara mendorong sektor-sektor ekonomi yang padat karya (bukan padat modal) untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pilihan lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah menstimulus terjadinya perpindahan tenaga kerja dari sektor padat karya ke sektor pada modal yang salah satunya dapat dilakukan dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya yang bekerja di sektor padat karya. Dengan mendorong sektor-sektor ekonomi yang padat karya (atau memindahkan tenaga kerja ke sektor pada modal) diharapkan pertumbuhan ekonomi akan dinikmati oleh lebih banyak penduduk. Sebagai akibatnya, akan terjadi redistribusi pendapatan yang mendorong semakin meratanya pendapatan antar kelompok penduduk (miskin dan tidak miskin) sehingga akan mengurangi kemiskinan.

6.3 Keterbatasan Penelitian

Adapun beberapa keterbatasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Ketimpangan pendapatan dalam penelitian ini dicerminkan oleh nilai Koefisien Gini yang dihitung dengan menggunakan pendekatan (proksi) pengeluaran konsumsi. Meskipun pendekatan tersebut diakui, penggunaan data pengeluaran konsumsi dalam pengukuran distribusi pendapatan ini bisa memberikan informasi pendapatan yang *under estimate*. Oleh sebab itu, hasil estimasi penelitian yang menggunakan data Koefisien Gini ini kurang dapat menggambarkan kenyataan yang sebenarnya khususnya dalam hal ketimpangan pendapatan.
- Penelitian ini menggunakan data panel 26 propinsi yang ada di Indonesia dengan menggabungkan propinsi-propinsi hasil pemekaran ke propinsi asalnya. Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan di propinsi-propinsi hasil pemekaran tidak terlihat dalam analisa. Sedangkan analisa untuk propinsi-propinsi asalnya pun tidak menggambarkan kenyataan yang sebenarnya karena adanya data propinsi hasil pemekaran yang digabungkan ke data propinsi asal tersebut.
- Karena keterbatasan data, data *Poverty Gap Index* (P1) dan *Poverty Severity Index* (P2) gabungan antara propinsi hasil pemekaran dengan propinsi asalnya menggunakan proxy dari data propinsi asal. Dengan demikian, maka aspek kedalaman dan keparahan kemiskinan di penelitian ini, khususnya pada propinsi asal pemekaran, tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.